

Pengaruh Belanja Daerah dan Deviden Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kutai Timur

Nurfiza Widayati^{1*}, Selly Swandari², Akbar Lufi Zulfikar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda
Jalan Kuaro Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu
Email: nurfizawidayati@feb.unmul.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2011–2022. Penelitian menggunakan data sekunder time series yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. Analisis dilakukan melalui dua sub-struktur persamaan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel. Variabel belanja daerah, dividen, dan PDRB ditransformasi ke dalam logaritma natural, sedangkan derajat desentralisasi fiskal diukur menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sementara dividen atas penyertaan modal berpengaruh positif tetapi belum signifikan. Pada model derajat desentralisasi fiskal, belanja daerah, dividen, dan PDRB belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal daerah lebih berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi regional daripada dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas belanja publik, optimalisasi kinerja BUMD, dan penguatan basis PAD untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PDRB, Desentralisasi Fiskal, Deviden, Analisis Jalur

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional expenditure and dividends on regional government equity participation on Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the degree of fiscal decentralization in East Kutai Regency during the 2011–2022 period. The study uses secondary time series data obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency, the Regional Revenue Agency, and the Central Statistics Agency of East Kutai Regency. The analysis is conducted through two sub-structure equations to test the direct and indirect relationships between variables. The variables of regional expenditure, dividends, and GRDP are transformed into natural logarithms, while the degree of fiscal decentralization is measured using the ratio of Regional Original Income (PAD) to total regional revenue. The results show that regional expenditure has a positive and significant effect on GRDP, while dividends on equity participation have a positive but not yet significant effect. In the model of the degree of fiscal decentralization, regional expenditure, dividends, and GRDP have not shown a statistically significant effect. These findings indicate that regional fiscal instruments play a greater role in encouraging regional economic activity than in increasing regional fiscal independence. This study emphasizes the importance of improving the quality of public spending, optimizing the performance of Regionally-Owned Enterprises (BUMD), and strengthening the PAD base to support more sustainable regional development.

Keywords: Regional Spending, GRDP, Fiscal Decentralisation, Dividends, Path Analysis

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan publik di Indonesia karena memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik wilayah [1], [2]. Dalam kerangka tersebut, belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif anggaran, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal yang memengaruhi penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi daerah [3].

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah yang memiliki kapasitas ekonomi relatif besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Selama periode 2011–2022, belanja daerah menunjukkan

perkembangan yang berfluktuasi, sementara PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun [4]. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu sejalan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, terutama apabila basis penerimaan asli daerah relatif sempit dibanding skala kegiatan ekonomi regional [5].

Selain belanja daerah, salah satu sumber penerimaan yang relevan adalah dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah. Dividen BUMD secara teoritis dapat memperkuat PAD dan mendukung derajat desentralisasi fiskal [6]. Namun, kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah sangat bergantung pada kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan tata kelola perusahaan daerah [7]. Oleh karena itu, hubungan antara belanja daerah, dividen, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian fiskal perlu dianalisis secara empiris dalam konteks daerah.

Kajian empiris mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan belanja, desain transfer fiskal, serta kemampuan daerah dalam memperluas sumber pendapatan sendiri [5]. Dalam konteks daerah berbasis sumber daya, PDRB yang tinggi tidak selalu dapat dikonversi menjadi PAD yang tinggi karena sebagian besar aktivitas ekonomi dapat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang ruang pemungutannya tidak sepenuhnya berada pada pemerintah daerah [5].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja daerah dan dividen atas penyertaan modal terhadap PDRB, pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap derajat desentralisasi fiskal, serta pengaruh tidak langsung melalui PDRB. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian fiskal pada Kabupaten Kutai Timur.

Desentralisasi fiskal merupakan proses pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, kualitas pelayanan publik, dan responsivitas kebijakan daerah [1],[2]. Dalam konteks keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal umumnya diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah [3]. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhannya dari sumber pendapatan sendiri [8].

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif Keynesian, pengeluaran pemerintah berperan dalam mendorong permintaan agregat, memperluas aktivitas produksi, dan menciptakan dampak pengganda terhadap perekonomian [9]. Dalam konteks daerah, belanja yang diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan belanja yang bersifat administratif semata [10].

Pengaruh positif belanja daerah terhadap PDRB juga dapat dipahami melalui mekanisme peningkatan kapasitas produksi wilayah, penciptaan kesempatan kerja, dan stimulasi aktivitas swasta. Namun, kekuatan pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas belanja, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kesesuaian alokasi belanja dengan kebutuhan ekonomi daerah [11].

Dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi salah satu komponen PAD [12]. Secara teoritis, semakin baik kinerja BUMD, semakin besar potensi dividen yang dapat diterima pemerintah daerah. Dividen tersebut pada gilirannya dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan [10].

Meskipun demikian, kontribusi dividen BUMD terhadap PAD sering kali terbatas karena banyak BUMD menghadapi permasalahan efisiensi, tata kelola, skala usaha, dan orientasi bisnis. Oleh sebab itu, pengaruh dividen terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kemandirian fiskal tidak selalu signifikan, terutama jika BUMD belum berfungsi sebagai entitas bisnis yang produktif [13].

PDRB merupakan indikator utama untuk menggambarkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah [14]. Secara teoritis, peningkatan PDRB dapat memperluas basis pajak dan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan PAD dan memperkuat derajat desentralisasi fiskal [8].

Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat otomatis. Pada daerah yang didominasi oleh sektor ekstraktif atau sektor yang basis pungutannya lebih besar berada pada pemerintah pusat, kenaikan PDRB belum tentu diikuti oleh peningkatan PAD secara proporsional. Oleh karena itu, hubungan antara PDRB dan derajat desentralisasi fiskal perlu dilihat tidak hanya dari sisi pertumbuhan output, tetapi juga dari struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah [15].

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series tahunan selama periode 2011–2022. Analisis dilakukan melalui model persamaan jalur yang dibagi ke dalam dua sub-struktur untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel [16]. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan empiris antara variabel fiskal daerah, PDRB, dan derajat desentralisasi fiskal.

Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan empat variabel utama. Belanja daerah (X_1) didefinisikan sebagai realisasi pengeluaran daerah menurut APBD Kabupaten Kutai Timur dalam satuan rupiah. Dividen atas penyertaan modal (X_2) didefinisikan sebagai penerimaan pemerintah daerah dari laba BUMD dalam satuan rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (Y_1) diukur menggunakan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah [4]. Derajat desentralisasi fiskal (Y_2) diukur dengan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah dalam persentase [17].

Belanja daerah, dividen, dan PDRB ditransformasi ke dalam logaritma natural untuk menstabilkan varians data dan memudahkan pembacaan koefisien sebagai elastisitas parsial. Derajat desentralisasi fiskal tidak ditransformasi ke logaritma karena variabel ini berbentuk rasio persentase dengan rentang terbatas dan lebih tepat dipertahankan dalam bentuk aslinya. Transformasi logaritma pada dividen dilakukan setelah memastikan seluruh nilainya positif sehingga hasil estimasi tetap dapat diinterpretasikan secara konsisten.

Sumber Data dan Periode Penelitian

Data penelitian berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2011–2022 [4]. Data yang digunakan merupakan data agregat tahunan yang merepresentasikan kondisi fiskal dan ekonomi daerah selama periode pengamatan.

Model Analisis Jalur

Model penelitian disusun ke dalam dua sub-struktur. Persamaan pertama digunakan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan dividen terhadap PDRB. Persamaan kedua digunakan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, dividen, dan PDRB terhadap derajat desentralisasi fiskal. Model tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Sub-struktur 1:

$$Y_1 = \beta_{1x1}X_1 + \beta_{1x2}X_2 + \varepsilon_1$$

Sub-struktur 2:

$$Y_2 = \beta_{2x1}X_1 + \beta_{2x2}X_2 + \beta_{2y1}Y_1 + \varepsilon_2$$

Di mana β merepresentasikan koefisien jalur (standardized coefficient/beta), dan ε adalah residual (pengaruh variabel lain di luar model). Koefisien pada persamaan logaritmik dibaca sebagai elastisitas parsial. Dengan demikian, perubahan persentase pada variabel independen dapat dikaitkan dengan perubahan persentase pada variabel dependen sepanjang spesifikasi model tetap konsisten.

Uji Asumsi Klasik dan Teknik Analisis

Sebelum estimasi dilakukan, model diuji melalui beberapa pengujian asumsi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui pemeriksaan pola residual dan idealnya dikonfirmasi dengan uji formal seperti White test, Breusch-Pagan, atau Glejser. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson [16].

Karena data yang digunakan berupa data time series tahunan, perhatian juga diberikan pada karakteristik runtun waktu, terutama potensi tren dan hubungan semu antarvariabel. Oleh sebab itu, hasil estimasi diinterpretasikan secara hati-hati sebagai hubungan empiris yang terbatas. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan hubungan kausal yang kuat, terutama karena jumlah observasi relatif kecil dan model belum memasukkan variabel kontrol lain seperti inflasi, harga komoditas, transfer pusat, investasi swasta, dan struktur sektoral daerah [18].

Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan Variabel Penelitian

Selama periode 2011–2022, belanja daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata sekitar Rp2,9 triliun per tahun. Dividen atas penyertaan modal rata-rata sekitar Rp5,8 miliar per tahun dengan tingkat volatilitas yang relatif tinggi. Pada periode yang sama, PDRB Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kecenderungan meningkat dari sekitar Rp69,5 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp97,2 triliun pada tahun 2022. Derajat desentralisasi fiskal mengalami perubahan sepanjang periode pengamatan, tetapi nilainya masih relatif rendah dibandingkan dengan besarnya kapasitas ekonomi daerah.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah batas umum dan nilai tolerance di atas batas minimum, sehingga tidak terdapat indikasi kuat terjadinya multikolinearitas. Pemeriksaan heteroskedastisitas berdasarkan pola residual tidak menunjukkan pola yang sistematis, meskipun

pengujian formal tetap diperlukan untuk memperkuat kesimpulan. Nilai Durbin-Watson sebesar 0,664 menunjukkan adanya kecenderungan autokorelasi positif, sehingga hasil estimasi perlu dibaca secara hati-hati dalam konteks data time series tahunan.

Hasil Analisis Jalur

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan koefisien jalur sebesar 0,606 dan nilai signifikansi 0,031. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah berkaitan dengan kenaikan PDRB dalam spesifikasi model logaritmik yang digunakan. Dividen atas penyertaan modal berpengaruh positif terhadap PDRB dengan koefisien 0,271, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen.

Pada persamaan derajat desentralisasi fiskal, belanja daerah menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,285 dengan nilai signifikansi 0,458. Dividen atas penyertaan modal menunjukkan koefisien positif sebesar 0,282 dengan nilai signifikansi 0,371. PDRB menunjukkan koefisien positif sebesar 0,620 dengan nilai signifikansi 0,151. Ketiga hubungan tersebut menunjukkan arah pengaruh yang berbeda, tetapi belum signifikan secara statistik.

Pengaruh tidak langsung belanja daerah terhadap derajat desentralisasi fiskal melalui PDRB sebesar 0,375, sedangkan pengaruh totalnya sebesar 0,090. Pengaruh tidak langsung dividen terhadap derajat desentralisasi fiskal melalui PDRB sebesar 0,168, dengan pengaruh total sebesar 0,450. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung melalui PDRB tetap ada, tetapi belum cukup kuat untuk menghasilkan signifikansi pada persamaan akhir.

Pembahasan

Pengaruh positif dan signifikan belanja daerah terhadap PDRB menunjukkan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah daerah memiliki keterkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa belanja publik dapat mendorong permintaan agregat, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian daerah [19]. Dalam konteks Kutai Timur, pengaruh tersebut dapat mencerminkan pentingnya pengeluaran daerah dalam menopang aktivitas ekonomi, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

Meskipun demikian, hubungan antara belanja daerah dan PDRB tidak dapat dilepaskan dari kualitas belanja yang dilakukan. Belanja daerah yang besar tidak selalu identik dengan efisiensi atau produktivitas fiskal yang tinggi. Oleh karena itu, signifikansi pengaruh belanja terhadap PDRB perlu dipahami sebagai indikasi hubungan empiris antara kapasitas fiskal dan output ekonomi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh struktur belanja telah optimal.

Pengaruh dividen atas penyertaan modal yang positif tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa kontribusi BUMD terhadap perekonomian dan kemandirian fiskal daerah masih terbatas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh skala dividen yang relatif kecil, tingkat profitabilitas BUMD yang belum kuat, serta tata kelola perusahaan daerah yang belum optimal [20]. Dengan demikian, BUMD di daerah belum sepenuhnya berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat PAD dan menopang pembangunan ekonomi daerah.

Hubungan positif tetapi tidak signifikan antara PDRB dan derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum secara otomatis meningkatkan kemandirian fiskal. Pada daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor-sektor besar tertentu, peningkatan PDRB tidak selalu disertai dengan peningkatan PAD yang proporsional [18]. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya output ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan perpajakan daerah, kualitas administrasi penerimaan, serta struktur sektor ekonomi yang dapat dipungut pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya jarak antara kapasitas ekonomi daerah dan kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Kutai Timur dapat memiliki output ekonomi yang besar, tetapi kemandirian fiskalnya tetap terbatas apabila ruang penerimaan asli daerah tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan tata kelola BUMD, dan perluasan basis PAD agar desentralisasi fiskal dapat berjalan lebih efektif.

Simpulan

Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur. Dividen atas penyertaan modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB. Pada persamaan derajat desentralisasi fiskal, belanja daerah, dividen, dan PDRB belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah lebih terlihat hubungannya dengan aktivitas ekonomi regional daripada dengan peningkatan langsung derajat desentralisasi fiskal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum otomatis berkonversi menjadi kemandirian fiskal yang lebih kuat. Oleh karena itu, penguatan desentralisasi fiskal memerlukan tidak

hanya pertumbuhan output ekonomi, tetapi juga perluasan basis PAD, perbaikan tata kelola BUMD, dan peningkatan efektivitas belanja publik.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu meningkatkan kualitas alokasi belanja daerah pada sektor-sektor yang memiliki dampak produktif terhadap perekonomian, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dasar. Di sisi lain, penguatan tata kelola BUMD perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional, pengembangan model bisnis yang sehat, dan peningkatan kontribusi dividen terhadap PAD. Selain itu, penguatan administrasi penerimaan daerah dan perluasan basis PAD perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih efektif diterjemahkan menjadi kemandirian fiskal.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjut

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah observasi yang relatif kecil, sehingga hasil estimasi perlu ditafsirkan secara hati-hati. Model penelitian juga belum memasukkan sejumlah variabel kontrol penting seperti inflasi, harga komoditas, transfer pusat, investasi swasta, populasi, dan struktur sektoral daerah. Selain itu, penggunaan data time series tahunan menuntut pengembangan analisis yang lebih kuat terhadap karakteristik runtun waktu, termasuk stasioneritas dan potensi hubungan semu antarvariabel.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, memasukkan variabel kontrol yang lebih relevan, serta menerapkan metode ekonometrika yang lebih sesuai untuk data time series, seperti ARDL, ECM, VAR, atau VECM. Pengembangan penelitian juga dapat diarahkan pada analisis komposisi belanja daerah, evaluasi kinerja BUMD, dan kajian struktur ekonomi daerah agar hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- [1] “Undang Undang Republik Indonesia”.
- [2] “Uu Nomor 23 Tahun 2014.”
- [3] Lusya Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, And Wahjoe Pangestoeti, “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara,” *Studi Adm. Publik Dan Ilmu Komun.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 43–53, Jan. 2025, Doi: 10.62383/Studi.V2i1.102.
- [4] A. Rante, M. S. Mire, And A. Paminto, “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah,” *Inovasi*, Vol. 13, No. 2, P. 92, Jan. 2018, Doi: 10.29264/Jinv.V13i2.2461.
- [5] D. Puspita *Et Al.*, “Ubaidi S. Hamidi Dan Dewi Puspita”.
- [6] M. Mina And R. Ratna, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah Di (Bumd) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara,” *J. Ekon. Reg. Unimal*, Vol. 3, No. 1, P. 39, Nov. 2020, Doi: 10.29103/Jeru.V3i1.3200.
- [7] Q. Asy’ari And Moh. Ramin, “Strategi Manajemen Keuangan Bumd Untuk Pertumbuhan Ekonomi Regional Dan Daya Saing Nasional,” *J. Ris. Akunt. Dan Bisnis Indones.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 188–210, Jun. 2025, Doi: 10.32477/Jrabi.V5i2.1199.
- [8] A. S. T. Pabayo, “Impact Of Fiscal Decentralization Policy On Regional Fiscal Independence In Indonesia,” *J. Local Gov. Issues*, Vol. 8, No. 1, Pp. 142–160, Mar. 2025, Doi: 10.22219/Logos.V8i1.37646.
- [9] I. Sukadana, “Gede Dwi Purnama Putra”.
- [10] “9270-39196-1-Pb.”
- [11] I. M. J. A. Dwipatna, “Efficiency Of Indonesian Government Education Spending: A Stochastic Frontier Analysis Approach,” *J. Dev. Econ.*, Vol. 10, No. 2, Pp. 236–248, Dec. 2025, Doi: 10.20473/Jde.V10i2.77487.
- [12] I. Hamzami Ulfi, “Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah,” *Bina Ekon.*, Vol. 25, No. 2, Pp. 115–134, Jan. 2022, Doi: 10.26593/Be.V25i2.5259.21-40.
- [13] K. A. Rahman, F. Oemar, And R. A. Munthe, “The Role Of Regional-Owned Enterprises (Bumd) In Enhancing Local Own-Source Revenue,” Vol. 1, No. 2, 2025.
- [14] Z. Rahman And S. Sumarni, “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi,” *Jesya*, Vol. 7, No. 1, Pp. 1183–1193, Feb. 2024, Doi: 10.36778/Jesya.V7i1.1575.
- [15] A. D. Saputra And L. Kurniawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.
- [16] “Mpdr5202-M1.”
- [17] S. M. Dilliana, S. Akun, M. Si, And H. Herdi, “Manajemen Keuangan Daerah”.

- [18] L. R. Ihwandi And K. Khoirunurrofik, "Regional Financial Performance And Inclusive Economic Development: Empirical Evidence From Provinces In Indonesia," *J. Bina Praja*, Vol. 15, No. 2, Pp. 417–429, Aug. 2023, Doi: 10.21787/Jbp.15.2023.417-429.
- [19] L. Arsyad, "Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi".
- [20] H. A. P. Sitaniapessy, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdrb Dan Pad," *J. Econ.*, Vol. 9, 2013.